

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya, salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan pembangunan dalam bidang perekonomian, dimana pertumbuhan ekonomi sebagai indikatornya. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor untuk mengukur tingkat pembangunan manusia yang dilihat dari tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara, yang diukur dengan pendapatan perkapitanya. Sumber daya manusia (*Human Capital*) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776, yang menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara, yaitu pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian serta kualitas manusia, kualitas manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Dalam publikasinya, Badan Pusat Statistik telah merubah beberapa indikator yang sudah tidak tepat lagi untuk digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu (1) Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka harapan lama sekolah, (2) Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, sehingga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (Prihastuti, 2018).

Berdasarkan data dari BPS dapat diketahui Indeks Pembangunan Manusia tertinggi tahun 2023 di Indonesia adalah DKI Jakarta yaitu sebesar 83,55 sedangkan yang terendah berada di Papua dengan IPM sebesar 63,01 dan rata-

rata IPM penduduk Indonesia sebesar 74,39, dimana Riau memperoleh IPM sebesar 74,95 diatas dari rata-rata IPM penduduk Indonesia (<https://www.bps.go.id/>). Pembangunan manusia di Provinsi riau terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Provinsi Riau sudah berada di level tertinggi selama 2020 -2023, IPM Riau rata-rata meningkat sebesar 2,78 persen per tahun, dari 72,44 pada tahun 2019 menjadi 74,95 pada tahun 2023 (<https://www.riau.bps.go.id>).

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau, 2019-2023

KOMPONEN	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Umur harapan hidup saat lahir	Tahun	71,19	73,66	73,72	73,95	74,18
Harapan lama sekolah	Tahun	13,11	13,20	13,28	13,29	13,30
Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,92	9,14	9,19	9,22	9,32
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp (000)	10.968	10,675	10,736	11,158	11,448
IPM		72,44	73,67	73,89	74,45	74,95

Sumber : Data Olahan, 2024

Provinsi Riau adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur pulau Sumatera bagian tengah. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan yang terletak di sebelah Timur Sumatera dan sebelah Selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar di Provinsi riau adalah Pekanbaru, dan kota besar lainnya setelah Pekanbaru adalah kota Dumai. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik riau tahun 2023, penduduk Provinsi Riau berjumlah 6.493.603 jiwa, dengan kepadatan penduduk 75 jiwa/km², dan pada akhir 2023 berjumlah 6.861.237 jiwa penduduk. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 160.00 hektare hutan habis ditebang

setiap tahun, meninggalkan 22%, atau 2,45 juta hektare pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun, dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di daerah ini, penting untuk kita mengetahui pengaruh beberapa faktor terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Karena indeks pembangunan manusia menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu negara, meningkatkan dan meratanya indeks ini bersama dengan penurunan jumlah penduduk miskin akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Melliana dan Zain, 2013).

Construction Cost Indeks (CCI), suatu indeks yang menunjukkan biaya konstruksi di suatu daerah, adalah salah satu komponen yang dapat mempengaruhi *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Badan Pusat Statistika (2023), konstruksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan bangunan atau struktur yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik untuk tujuan tinggal atau kegiatan lainnya. Selain itu Pertumbuhan Ekonomi juga menjadi faktor penting dalam peningkatan Indeks Pertumbuhan Manusia. Kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat kepada penduduknya disebut pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kemampuan ini didasarkan pada kemajuan kelembagaan dan teknologi serta penyesuaian ideology yang diperlukan. Selain indeks biaya konstruksi dan pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja modal juga berperan dalam meningkatkan Indeks Pertumbuhan Manusia, dengan alokasi belanja modal yang tepat dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia, seperti jalan, jembatan, sistem air dan fasilitas kesehatan. Alokasi yang efektif dan efisien dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Fhino dan Priyo (2009), Indeks Pembangunan Manusia juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada akhirnya ditentukan oleh banyak faktor terutama pertumbuhan ekonomi,

infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Infrastruktur dibangun oleh negara melalui belanja modal. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2023 belanja modal dapat berupa : (1) tanah, (2) peralatan dan mesin, (3) gedung dan bangunan, (4) jalan, irigasi dan jaringan, (5) belanja modal lainnya, dan (6) belanja modal Badan Layanan Umum (BLU).

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saat ini prioritas utama pembangunan nasional masih bertumpu pada pembangunan fisik, mengalahkan bidang pendidikan yang memiliki arti dan bersifat strategis dalam memperbaiki kehidupan negara ini. Untuk itu sudah seharusnya kita menggeser skala prioritas utama pembangunan nasional dengan menempatkan pendidikan sebagai hal yang utama dalam meningkatkan pembangunan manusia. Karena itu, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi, melalui upaya meningkatkan mutu pendidikan, merupakan suatu yang mutlak untuk membangun negara ini agar lebih memiliki kompeten di dunia internasional. Penelitian sebelumnya sudah diteliti oleh Catherine Meidina, dkk, dengan judul *Pengaruh Construction Cost Index, Economic Growth, dan Capital Expenditure Allocation Terhadap Human Development Index* di Provinsi Bangka Belitung dengan begitu saya ingin meneliti dengan judul dan variable yang sama namun berbeda pada wilayah saya meneliti di Provinsi Riau, meskipun variable-variabel yang digunakan sama namun masing-masing wilayah memiliki karakteristik ekonomi dan social yang berbeda. Provinsi Bangka Belitung lebih mengandalkan sektor pertambangan, terutama Timah, serta Pariwisata dan Perikanan sedangkan Provinsi Riau dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam serta perkebunan kelapa sawit. Sehingga sektor-

sektor ini sangat mempengaruhi struktur ekonomi dan pembangunan daerah, serta pola alokasi belanja modal yang berbeda di setiap wilayah. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji “Pengaruh Indeks Biaya Konstruksi, Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau selama periode tahun 2019-2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Biaya Konstruksi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama periode 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama periode 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama periode 2019-2023?
4. Apakah Indeks Biaya Konstruksi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Alokasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama periode 2019-2023?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, serta berdasarkan proses penelitian yang dilakukan peneliti. Maka penelitian ini akan memfokuskan pada Pengaruh Indeks Biaya Konstruksi, Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tahun 2019-2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh Indeks Biaya Konstruksi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama periode 2019-2023.
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama periode 2019-2023.
3. Pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama periode 2019-2023.
4. Pengaruh Indeks Biaya Konstruksi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Alokasi Belanja Modal dalam Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama Periode 2019-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis Bagi peneliti bisa menambah bahan kajian, referensi tentang Biaya Kontruksi, Pertumbuhan Ekonomi serta Alokasi Belanja Modal yang ada di Provinsi Riau
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
Memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah di Riau untuk menyusun strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan IPM, membantu dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran belanja modal sehingga dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas program-program pembangunan yang telah dijalankan, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya kebijakan yang lebih efektif berdasarkan hasil penelitian ini, masyarakat dapat merasakan peningkatan kesejahteraan ekonomi, termasuk kesempatan kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi.